

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NO : 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PDG
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM
DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UU NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

oleh :

NISA YULINDA PUTRI

1810111021

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK 1V)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Lucky Raspati, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**ANALISIS PUTUSAN NO : 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PDG
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM
DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UU NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan memiliki hukum yang luar biasa (*extraordinary law*) pula, sehingga terdapat beberapa peraturan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Salah satu bentuknya penyimpangannya terdapat didalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana didalam pasal tersebut di jelaskan jika tindak pidana korupsi di lakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Di dalam pasal ini yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi : 1. Penanggulangan keadaan bahaya, 2. Bencana alam nasional, 3. penanggulangan akibat kerusakan yang meluas, 4. Penanggulangan krisis ekonomi moneter. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan darurat bencana untuk mengambil keuntungan pribadi, dengan melakukan penyelewengan terhadap dana bencana alam. Putusan nomor: 5/pid.sus- TPK/2019/PN.Pdg, merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana korupsidana bencana alam, dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman minimum terhadap terdakwa tanpa memperhatikan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah : 1. Apa saja hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakimdalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencanaalam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg dan 2.Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan dan penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan 2 (dua) dasar pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : Korupsi, Keadaan Tertentu, Putusan Hakim